

PENGADAAN BAHAN PUSTAKA DI PERGURUAN TINGGI : SUATU PENGALAMAN DI PERPUSTAKAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ratnaningsih

Pustakawan Muda pada Perpustakaan IPB, email: ratna.andini@gmail.com

Abstrak

Pengadaan bahan pustaka adalah salah satu dari kegiatan pelayanan teknis pada suatu perpustakaan dalam usaha untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemustaka secara *up to date*. Melalui kegiatan kerja pengadaan, perpustakaan berusaha menghimpun bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi perpustakaan. Kegiatan pengadaan dimulai dari pemilihan, pemesanan, sampai pada tahap pemeriksaan dan inventarisasi. Dua sistem pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) adalah sistem lelang dan sistem swakelola. Masing-masing sistem mempunyai kelebihan dan kekurangan, kedua sistem tersebut telah dilakukan oleh Perpustakaan IPB dalam proses pengadaan buku dan jurnal. Pengalaman dalam menjalankan sistem pengadaan baik lelang maupun swakelola akan menjadi bahan evaluasi dalam memberikan masukan untuk kebijakan pengadaan yang akan datang.

Kata Kunci: Acquisition, Library Collection, Collection Development Policy

Pendahuluan

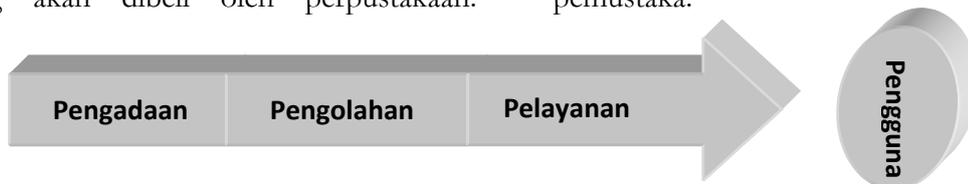
Banyak orang mengibaratkan bahwa pelayanan bagi suatu perpustakaan merupakan **ujung tombak**, karena biasanya ujung tombak tersebut akan menancap pada sasaran. Namun kali ini saya akan menggunakan anak panah pengganti tombak sebagai perumpamaan tersebut. Saya akan menganggap bahwa pelayanan bagi suatu perpustakaan merupakan **ujung anak panah** yang akan menancap pada sasaran yang kita bidik. Arah anak panah yang kita lepaskan tidak ditentukan oleh tajamnya ujung anak panah tersebut melainkan oleh bentuk dan penampilan pangkal anak panah yang bersangkutan. Oleh karena itu biasanya para pemanah akan membuat pangkal anak panahnya sebaik mungkin agar arah anak panah yang dilepas dari busurnya akan mengenai sasarannya dengan tepat. Misalnya saja, pangkal anak panah tersebut diberi bulu ayam atau bulu burung yang disusun sedemikian rupa yang dapat mengendalikan anak panah tersebut. Setajam apapun ujung anak

panah tersebut tidak akan berguna jika arah anak panah yang dilepas dari busurnya tidak dapat diatur sehingga mengenai sasarannya. Tentu saja berlaku juga sebaliknya, sebagus apapun arah anak panah tersebut jika ujungnya tidak dibuat tajam, maka anak panah tersebut tidak akan menancap dengan baik pada sasaran yang telah ditentukan.

Dengan mengibaratkan bahwa sebuah perpustakaan merupakan perjalanan sebuah anak panah, dan pelayanan merupakan ujungnya, maka bagian pengadaan merupakan pangkal dari anak panah tersebut. Jika kita menginginkan anak panah menuju sasaran dengan tepat, maka bagian pengadaan ini harus dikelola dengan baik. Salah satu tugas dari bagian pengadaan dari suatu perpustakaan adalah membeli buku-buku yang akan menjadi koleksi perpustakaan. Agar koleksi yang akan digunakan oleh pemustaka tersebut sesuai dengan kebutuhannya (*meet the users' need*) maka perpustakaan tidak boleh sembarangan dalam menentukan buku-buku yang akan dibeli. Untuk itu dasar pembelian buku

tersebut haruslah kebutuhan pemustaka yang akan diperoleh melalui survei pemustaka atau yang dikenal dengan *users' study*. Jadi **idealnya** pengadaan buku perpustakaan ditentukan **hanya oleh pemustaka**. Pustakawan atau siapapun selain pemustaka tidak memiliki kewenangan dalam menentukan buku yang akan dibeli oleh perpustakaan.

Intervensi pustakawan (manajemen perpustakaan) hanyalah terbatas kepada administrasi pengadaannya saja, namun tidak kepada substansi pengadaan bukunya. Gambar 1 berikut menggambarkan proses kerja di perpustakaan yang dapat diibaratkan anak panah yang sedang bergerak menuju sasaran yaitu pemustaka.



Gambar 1. Proses di Perpustakaan sebagai Anak Panah Menuju Sasaran (Pemustaka)

Proses Pengadaan di Perpustakaan

Tugas setiap perpustakaan adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada setiap pemustakanya. Tugas ini dapat dilakukan dengan baik apabila perpustakaan tersebut dapat membangun koleksinya dengan baik dan relevan dengan kebutuhan pemustakanya sehingga seluruh kebutuhan pemustakanya dapat terlayani dengan baik. Namun pada saat ini kondisi demikian mustahil dapat dipenuhi oleh suatu perpustakaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana, keragaman pemustaka, berkembangnya jumlah buku dan majalah yang ada seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu maka tugas perpustakaan akan menjadi berat karena harus memilih dari sekian banyak ragam buku dan majalah untuk dijadikan koleksi. Proses ini dikenal dengan nama seleksi bahan pustaka dan merupakan langkah awal dari pembinaan bahan pustaka.

Seleksi merupakan proses identifikasi bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di perpustakaan sebelumnya. Di perpustakaan perguruan tinggi proses seleksi ini biasanya dilakukan oleh staf pengajar atau dosen. Perpustakaan biasanya menyediakan formulir yang

diedarkan kepada seluruh staf pengajar di universitasnya.

Pengiriman formulir ini biasanya dilakukan melalui fakultas atau bahkan langsung ke departemen. Selain staf pengajar, biasanya pustakawan sendiri (khususnya *subject matter specialist*) dapat juga melakukan seleksi. Kadang-kadang di beberapa perpustakaan perguruan tinggi, mahasiswa juga dimintai pendapat dalam hal seleksi bahan pustaka ini. Namun bila ada saran dari mahasiswa untuk pembelian koleksi, khususnya majalah, pihak perpustakaan harus betul-betul mempertimbangkan apakah saran tersebut memang perlu dipenuhi. Dasarnya adalah apakah koleksi atau majalah tersebut memang untuk menunjang pelaksanaan perkuliahan, atau dengan alasan lain. Keputusan seleksi dibuat dengan sangat hati-hati agar dapat memuaskan pemustaka khususnya yang pemberi saran untuk membeli koleksi tersebut. Setelah formulir ini masuk kembali ke perpustakaan, maka staf perpustakaan akan melakukan pengecekan ke koleksi. Hal ini sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi duplikasi koleksi yang tidak diinginkan. Selain dilakukan pengecekan ke katalog juga harus dilakukan pengecekan berkas buku yang sedang dipesan. Tujuannya adalah sama yaitu untuk menghindari terjadinya duplikasi koleksi yang tidak diinginkan. Slip atau

formulir ini kemudian dikelompokkan menurut subjek atau menurut penerbit sesuai dengan kebutuhan.

Pengadaan Koleksi Melalui Pembelian

Di perpustakaan perguruan tinggi pengadaan koleksi melalui pembelian dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung besarnya dana dan asal sumber dana. Misalnya saja pembelian dengan anggaran di atas empat juta rupiah tetapi di bawah dua puluh juta rupiah dan sumber dananya berasal dari anggaran pembangunan, maka pengadaannya harus dilakukan oleh perusahaan melalui penunjukan oleh pimpinan proyek (panitia pengadaan barang pada proyek peningkatan perguruan tinggi). Namun bila sumber dananya berasal dari dana masyarakat, maka pengadaan/ pembelinya dapat dilakukan dengan cara swakelola oleh perpustakaan. Terlepas dari cara pengadaan tersebut maka pembelian buku dapat dilakukan melalui berbagai saluran yang ada yaitu: 1) toko buku; 2) penerbit dalam negeri dan luar negeri; dan 3) agen buku dalam negeri dan luar negeri.

Tinjauan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia

Setiap pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh suatu instansi/lembaga di Indonesia yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berpedoman pada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003. Tujuannya adalah agar pelaksanaan pengadaan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa terdiri dari beberapa pointer diantaranya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri khususnya peran serta usaha kecil dan meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Kegiatan pengadaanpun harus diumumkan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan dapat mengikuti sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu pointer yang sangat penting dalam etika pengadaan itu sendiri adalah menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Pelaksanaan atas pengadaan itu sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan penyedia barang/jasa dan dengan cara swakelola.

Pengadaan dengan Cara Swakelola

Definisi swakelola berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri. Pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh : 1) pemustaka barang/jasa; 2) instansi pemerintah lain; dan 3) kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah.

Pelaksanaan pengadaan secara swakelola khususnya untuk koleksi buku dan jurnal pernah dilaksanakan oleh Perpustakaan IPB pada tahun 2003-2005 yang memperoleh dana APBN senilai Rp. 500.000.000,00 Dalam hal ini perpustakaan diberi kewenangan penuh dalam hal pengadaan dari mulai seleksi, pengadaan, pembayaran, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan. Ada beberapa keuntungan yang bisa diambil dari sistem swakelola yang pernah diterapkan di Perpustakaan IPB antara lain: 1) alokasi dana yang telah ditentukan dapat terserap dalam kurun waktu yang telah ditentukan; 2) efisiensi penggunaan dana dapat mendekati 100 persen karena pembelian tidak dikenai pajak bea masuk pelabuhan,

PPn, tidak dikenai keuntungan perusahaan, biaya-biaya administrasi lelang serta biaya-biaya lain; namun ada tambahan biaya pengiriman buku dari penerbit ke perpustakaan; 3) bahan pustaka yang diadakan dapat mencapai hampir 100 persen dari jumlah yang direncanakan; dan 4) pengadaannya sesuai dengan target waktu.

Hal tersebut diatas tentunya sangat menguntungkan bagi pihak perpustakaan. Terutama untuk pengadaan jurnal, karena jurnal bersifat spesifik dan informasinya bersifat mutakhir (*current*). Tentunya proses pengadaan demikian memerlukan strategi yang baik agar jurnal bisa diterima sesuai waktu terbitnya. Biasanya kegiatan administrasi dan pembayaran dilaksanakan pada awal tahun. Berdasarkan pengalaman yang telah dilaksanakan oleh Perpustakaan IPB sejumlah jurnal yang dilanggan melalui dana APBN dan sistem pengadaannya dengan swakelola, penerimaan/ke-datangan jurnal tersebut tepat waktu artinya pada saat penerimaan informasi dari jurnal tersebut masih relevan. Ada beberapa faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan sistem swakelola diantaranya adalah: 1) pengelola dituntut memiliki kemampuan teknis administrasi baik persuratan maupun keuangan; 2) kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris; dan 3) kemampuan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.

Terlepas dari keuntungan dan faktor yang mendukung dari sistem yang diterapkan, pada pelaksanaannya sistem swakelola memang menuntut seorang pustakawan bekerja lebih kreatif, ulet, teliti dan berusaha mengembangkan koleksi yang ada di perpustakaan.

Pengadaan dengan Cara Lelang

Pada tahun 2009 Perpustakaan IPB memperoleh dana pengadaan bahan pustaka dari APBN senilai Rp 2.200.000.000,00 (Dua milyar dua ratus juta rupiah). Nilai tersebut cukup tinggi walaupun masih di bawah anggaran

perguruan tinggi lain yang setaraf dengan IPB seperti UI, ITB dan UGM yang rata-rata di atas nilai tersebut. Pada kurun waktu itu pula kebijakan berubah dari pengadaan sistem swakelola menjadi sistem lelang yang mengacu pada Keppres No.80 tahun 2003. Perpustakaan IPB hanya berperan sebagai *user*; menyampaikan kebutuhan bahan pustaka kepada pihak panitia yang telah ditetapkan oleh IPB. Selanjutnya panitia yang menentukan dari mulai pengadaan dan proses-proses teknis lainnya dengan mengacu pada Keppres. Perpustakaan dilibatkan dalam kegiatan rapat penjelasan pekerjaan (*Aanwizjing*) dan evaluasi data dari peserta lelang. Berdasarkan pengalaman mulai dari tahun 2006 sampai dengan saat ini ada beberapa masalah yang dihadapi yaitu : 1) banyak buku (kurang lebih 30 persen) yang tidak bisa diadakan dan diganti dengan judul lain sebagai pengganti; 2) penerimaan jurnal tercetak pada tahun 2006-2009 tidak sesuai waktu sehingga informasinya sudah tidak relevan lagi; dan 3) anggaran yang sudah dialokasikan untuk pengadaan buku/jurnal tidak bisa diserap secara maksimal.

Pada tahun 2010, IPB masih memberlakukan kebijakan sistem lelang dan Perpustakaan IPB memperoleh anggaran pengadaan bahan pustaka sama dengan tahun sebelumnya yaitu senilai Rp 2.200.000.000,00 Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya Perpustakaan IPB berusaha untuk memperbaiki dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan panitia agar dalam pelaksanaannya pihak perpustakaan tidak dirugikan. Upaya yang dilakukan adalah pihak Perpustakaan IPB memberikan masukan kepada panita untuk menambahkan 1 (satu) pasal dalam dokumen kegiatan. Pasal yang ditambahkan tersebut adalah setiap berkas yang masuk dari peserta lelang perlu dilengkapi dengan bukti surat dukungan penerbit, sebagai bukti jaminan pengadaan. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2007 ada beberapa perkembangan,

yaitu: buku yang diadakan 95 persen bisa terpenuhi, penerimaan bahan pustaka khususnya buku sesuai waktu yang ditargetkan, dan anggaran untuk pengadaan buku/jurnal bisa terserap secara maksimal.

Adakah Cara Lain untuk Pengadaan Buku/Jurnal di Perpustakaan Khususnya di Perguruan Tinggi ?

Pertanyaan ini seringkali muncul jika kita berdiskusi masalah pengadaan dengan perguruan tinggi lain. Berdasarkan pengalaman Perpustakaan IPB dalam kurun waktu 10 tahun menjalankan sistem yang berbeda, setiap sistem yang dijalankan ada kelebihan dan kekurangannya. Khususnya untuk pengadaan jurnal, banyak masalah yang dihadapi jika dilakukan dengan lelang karena melihat kondisi kedatangannya tidak kontinyu dan tidak sesuai waktu yang diharapkan.

Jika kita melihat pengalaman yang telah dijalankan oleh perguruan tinggi lain seperti di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara misalnya, dimana dalam pengadaan bahan pustakanya mereka memanfaatkan dana yang bersumber dari Dana Masyarakat (DM), maka dalam proses pengadaannya Perpustakaan Universitas Sumatera Utara dapat membelanjakan koleksi pustaka lebih lentur (*flexible*) dibandingkan jika membelanjakan dana yang berasal dari APBN. Salah satu kelenturannya adalah dana yang bersumber dari Dana Masyarakat (DM) dapat dibelanjakan untuk koleksi jurnal dan buku elektronik. Belajar dari keberhasilan itulah maka Perpustakaan IPB mulai tahun 2010 secara bertahap mengalokasikan sumber Dana Masyarakat untuk langgan buku terbitan dalam negeri, jurnal terbitan dalam negeri, jurnal elektronik (*e journal*) dan buku elektronik (*e book*). Upaya yang dijalankan dalam proses

pengadaan bahan pustaka baik tercetak maupun elektronik adalah untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pemustaka. Diharapkan kedepan Perpustakaan IPB mendapatkan anggaran lebih terutama untuk melanggan jurnal elektronik (*e journal*) dan buku elektronik (*e book*), yang selama ini menjadi tuntutan dari pemustaka.

Pencanangan IPB menuju *research university* tentunya perlu didukung oleh ketersediaan informasi, literatur serta sarana-prasarana yang mendukungnya. Oleh karena itu, kehadiran perpustakaan yang memenuhi standar internasional jelas tidak dapat dipandang sebelah mata.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa pengadaan bahan perpustakaan perlu mendapat perhatian, karena bagian ini justru menentukan arah kemana sasaran perpustakaan akan dicapai.

Pengadaan bahan perpustakaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu swakelola dan sistem lelang. Pengadaan dengan sistem swakelola memiliki keunggulan dimana efisiensi pemanfaatan dana bisa mendekati 100 persen, sedangkan pengadaan dengan sistem lelang mempunyai keunggulan dimana beban pekerjaan berada pada pihak ketiga, namun efisiensi pemanfaatan dananya tentu lebih rendah karena biaya pihak ketiga dibebankan kepada anggaran APBN.

Perlu dipikirkan untuk menggantikan sebagian atau seluruhnya sumber dana pengadaan koleksi dari sumber dana APBN dengan sumber dana Dana Masyarakat agar pemanfaatan dana dapat lebih lentur dan bahan pustaka yang diterima sesuai perencanaan, mengingat masalah pengadaan koleksi perpustakaan memerlukan kelenturan tersebut.

Daftar Pustaka

[IPB] Institut Pertanian Bogor (2009) Laporan Tahunan 2009. Bogor: Perpustakaan IPB.

Republik Indonesia (2003) Keputusan Presiden RI, No. 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Seminar, Kudang B & Yuyu Yulia (2004) Pengembangan Koleksi di Perpustakaan IPB dalam Dinamika Perpustakaan IPB Menuju Perpustakaan Riset. Bogor: IPB Press.

Siregar, A.Ridwan (2004) Perpustakaan, Energi Pembangunan Bangsa. Medan: USU Press.